

**PENGARUH BUDAYA ETIS ORGANISASI, PENEGAKAN HUKUM DAN
ASIMETRI INFORMASI TERHADAP KECENDRONGAN
KECURANGAN AKUNTANSI (*FRAUD*)**
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

RINI NOVITA SARI
NIM 1303490/2013

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH BUDAYA ETIS ORGANISASI, PENEGAKAN HUKUM DAN
ASIMETRI INFORMASI TERHADAP KECENDRONGAN
KECURANGAN AKUNTANSI (*FRAUD*)
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang)

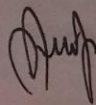
Nama : Rini Novita Sari
NIM/TM : 1303490 / 2013
Jurusan : Akuntansi (S1)
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2018

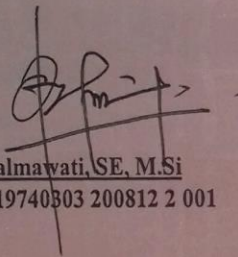
Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

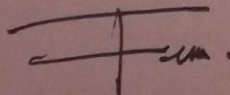


Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19720910 199802 2 003



Halmawati, SE, M.Si
NIP. 19740303 200812 2 001

Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : PENGARUH BUDAYA ETIS ORGANISASI, PENEGAKAN
HUKUM DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP
KECENDRONGAN KECURANGAN AKUNTANSI (*FRAUD*)
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Padang Panjang)

Nama : Rini Novita Sari

NIM/TM : 1303490 / 2013

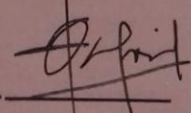
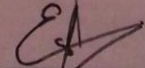
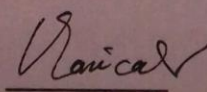
Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2018

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	1. 
2.	Sekretaris	Halmawati, SE, M.Si	2. 
3.	Anggota	Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	3. 
4.	Anggota	Vanica Serly, S.Pd, SE, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rini Novita Sari
NIM/Tahun Masuk : 1303490/2013
Tempat/Tgl Lahir : Bengkulu / 17 Mei 1995
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Soepto 1 No 31, Kec, Ratu Samban. Kel,
Anggut Dalam. Bengkulu. Kota Bengkulu
No. Hp/Telp : 082386046710
Judul Skripsi : Pengaruh Budaya Etis Organisasi, Penegakan Hukum
dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan
Kecurangan Akuntansi (*Fraud*) (Studi Empiris pada
SKPD Kota Padang Panjang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana yang diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi

Padang, Agustus 2018

atikan

Rini Novita Sari
NIM. 1303490

ABSTRAK

Rini Novita Sari (1303490 / 2013). Pengaruh Budaya Etis Organisasi, Penegakan Hukum, dan Asimetri Informasi terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang Panjang)

**Pembimbing : 1. Nurzi Sebrina, SE, M. Sc, Ak
2. Halmawati, SE, M. Si**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh budaya etis organisasi, penegakan hukum, dan asimetri informasi terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Padang Panjang yaitu sebanyak 24 SKPD. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui pengiriman kuesioner kepada responden. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan alat analisis metode statistik dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Sumber data merupakan pendapat dan persepsi dari setiap personil dalam instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam membuat atau menyusun laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi. 2) Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi. 3) Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi.

Kata Kunci : Budaya Etis Organisasi, Penegakan Hukum dan Asimetri Informasi.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Budaya Etis Organisasi terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini tidak akan mungkin penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Mama dan Papa yang senantiasa memberikan dukungan moril, meteril, serta kasih sayang dan do'a yang tiada hentinya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana. Kedua adik Ryan, Lola serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan perhatian dan do'a kepada penulis.
2. Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing 1 dan Ibu Halmawati, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah dengan penuh kesabaran banyak memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

3. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak dan Ibu Vanica Serly, SE, M.Si selaku penguji yang telah memberi banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Hendri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
7. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya jurusan Akuntansi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
8. Bapak dan Ibu SKPD Kota Padang Panjang yang telah membantu penulis dalam menjalankan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga kost Teratai 88 kakak-kakak, teman-teman seperjuangan dan adik-adik tercinta. (Kakak-kakak) komal, towik, ibu, makwo, kak sulas, (teman seperjuangan) mak noy, syepta, daday, sipik, mak dang, dangdut, intan dan (adik-adikku) jubir, aci, ani, icin, ii, maya, via, silvi, fuji, ade, alen, nana, indah, iyul, ica, feni, fika, saza, yati, diana, santi, aan. Berkat kalian, dukungan, semangat serta doa kalian memberikan motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat tercinta grup dadakan squad yang telah setia menemani dan memberikan do'a, motivasi dan semangat hingga skripsi ini selesai.
11. Para senior dan junior di se-lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memberikan semangat belajar, doa, dan motivasi penulis untuk berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman prodi Akuntansi angkatan 2013 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan prodi Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
13. Serta semua pihak yang telah membantu proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

1. ABSTRAK	i
2. KATA PENGANTAR.....	ii
3. DAFTAR ISI.....	v
4. DAFTAR TABEL	vii
5. DAFTAR GAMBAR.....	viii
6. DAFTAR LAMPIRAN	ix
7. BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
8. BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kajian Teori.....	12
1. <i>Agency Teory</i>	12
2. Kecendrungan Kecurangan Akuntansi	14
3. Budaya Etis Organisasi.....	23
4. Penegakan Hukum	29
5. Asimetri Informasi.....	33
B. Penelitian yang Relevan	36
C. Hubungan Antar Variabel.....	38
D. Kerangka Konseptual	43
E. Hipotesis	44
9. BAB III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian	46
B. Populasi dan Sampel.....	46
C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Pengumpulan Variabel Penelitian	47
F. Instrumen Penelitian.....	48

G. Uji Validitas dan Reabilitas.....	50
H. Model dan Metode Analisis Data	51
I. Definisi Operasional	55
10. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	58
B. Demografi Responden	58
C. Deskripsi Hasil Penelitian	61
D. Statistik Deskriptif.....	68
E. Uji Validitas dan Reabilitas pada Data Penelitian.....	69
F. Uji Asumsi Klasik	71
G. Uji Model.....	74
H. Uji Hipotesis	78
I. Pembahasan	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	87
B. Keterbatasan Penelitian	87
C. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Hasil Evaluasi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang.....	9
2. Skala Pengukuran X1, X2 dan X3	48
3. Skala Pengukuran Y	48
4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	49
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	58
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	59
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	61
9. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Budaya Etis Organisasi	62
10. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Penegakan Hukum	63
11. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Asimetri Informasi	64
12. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi...66	
13. Hasil Statistik Deskriptif.....	68
14. Hasil Uji Validitas.....	69
15. Hasil Uji Reabilitas	70
16. Hasil Uji Normalitas	72
17. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	73
18. Hasil Uji Multikolinearitas	74
19. Hasil Uji F.....	74
20. Hasil Adjusted R Square	75
21. Hasil Regresi Berganda.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Gambar 1 Kerangka Konseptual 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuisisioner Penelitian	92
2. Tabulasi Data Penelitian	96
3. Hasil Olah Data Penelitian.....	104

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kecurangan berasal dari kata curang yang artinya tidak jujur atau tidak adil. Sedangkan kecurangan adalah perbuatan yang curang, ketidakjujuran atau keculasan. Teori keagenan (Jensen and Meckling, 1976) sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Jensen dan Meckling (1976) juga menjelaskan bentuk-bentuk biaya keagenan, 1) biaya pemantauan, yaitu biaya ini dikeluarkan untuk memantau manajer dengan cara mengukur, mengamati, dan mengendalikan perilaku manajer, 2) biaya penjaminan, yaitu biaya ini muncul untuk menjamin manajer agar mengambil keputusan yang tidak merugikan dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham, 3) kerugian residu, yaitu biaya ini adalah kerugian yang ditanggung meskipun pemantauan (*monitoring*) dan penjamin (*bonding*) telah dilaksanakan.

Teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen disebut dengan *agency problems*. Salah satu penyebab *agency problems* adalah asimetri informasi. Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. Ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen, sebaliknya agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja secara keseluruhan.

Arens (2015:395) menyatakan bahwa kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksud untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam KUHP pasal 378 menjelaskan tentang perbuatan curang yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohohan, menggerakkan orang lain untuk menyediakan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menurut Sawyer's (2006:339) menjelaskan, kecurangan singkatnya adalah sebuah representasi yang salah atau penyembunyian fakta-fakta yang material untuk mempengaruhi seseorang agar mau ambil bagian dalam suatu hal yang berharga. *Institute of Internal Auditors* (IIA) menyebutkan kecurangan adalah meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan tersebut dilakukan untuk keuntungan ataupun kerugian organisasi dan oleh orang-orang di luar maupun di dalam organisasi.”

Di era persaingan yang semakin ketat saat ini, dapat menjadi pemicu bagi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Tindakan kecurangan dilakukan untuk memperoleh tujuan dan hasil tertentu yang dapat memberikan keuntungan bagi pribadi seseorang maupun kelompok. Kecurangan dapat terjadi di berbagai sektor, baik sektor swasta maupun pemerintahan. Dalam sektor pemerintahan, kecurangan dapat terjadi dalam

bentuk penyimpangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi (Wilopo, 2006).

Tindakan kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. *Transparency International* (TI) telah merilis data indeks persepsi korupsi (*corruption perception index*) untuk tahun 2016. Skor Indonesia adalah 37, pada urutan 90 dari 176 negara yang diamati. Rentang indeks CPI adalah 0-100 (0 dipersepsikan sangat korup, 100 sangat bersih). Indonesia mendapat skor 37 tersebut, menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih sangat tinggi (*Transparency International*, 2016)

Di Indonesia meskipun sudah banyak hukum dan peraturan yang ditegakkan, tidak membuat masyarakat untuk taat kepada hukum dan peraturan tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintahan pusat dan laporan pemerintahan daerah. Hasil dari temuan BPK tercatat pada semester I tahun 2017 potensi kerugian negara adalah Rp.27,39 triliun. BPK menemukan 14.997 permasalahan meliputi 7.284 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 7.549 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. (Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2017, BPK)

Kecendrungan kecurangan akuntansi (KKA) merupakan kesengajaan untuk melakukan tindakan pengalihan atau penambahan jumlah tertentu sehingga terjadi salah saji dalam laporan keuangan, namun

kesempatan untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan (Rahmawati, 2012).

Menurut Thoyibatun (2009) terjadinya kecendrungan kecurangan akuntansi membuat organisasi atau lembaga yang dikelola menjadi rugi. Sebagai contoh, volume produktivitas organisasi melemah, belanja sosial organisasi semakin sedikit, kepercayaan masyarakat yang dilayani beralih ke organisasi lain, dan mitra kerja tidak selera lagi untuk tetap bekerja sama. Di sisi lain kasus kecendrungan kecurangan akuntansi (KKA) tidak terlepas dari pemberitaan media massa. Jika demikian yang terjadi, reputasi dan citra organisasi yang terbangun selama ini menjadi sulit untuk dijadikan daya saing dalam meraih persaingan pasar yang semakin tajam.

Terjadinya kecendrungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya menurut Pristiyantri (2012) faktor terjadinya KKA yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, sistem pengendalian internal, kepatuhan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan komitmen organisasi. Pramudita (2013) mengelompokkan faktor terjadinya kecurangan yaitu gaya kepemimpinan, keefektifan sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi, dan penegakan hukum. Wilopo (2006) menyebutkan faktor kecurangan akuntansi yaitu, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, moralitas manajemen, pengendalian intern dan kesesuaian kompensasi.

Dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi, untuk penelitian selanjutnya faktor yang akan diteliti kembali hanya di ambil 3 faktor. Peneliti hanya ingin lebih memfokuskan ke tiga faktor saja yaitu budaya etis organisasi, penegakan hukum dan asimetri informasi. Karena dalam pemerintahan apabila budaya etis organisasi tidak diterapkan untuk menjadi pedoman maka kecendrungan seseorang untuk melakukan kecurangan akan semakin tinggi. Untuk penegakan hukum apabila tidak adanya hukum atau peraturan yang berlaku dengan tegas dalam suatu pemerintahan juga akan membuat terjadinya kecurangan tersebut. Sedangkan asimetri informasi merupakan kesenjangan informasi yang ada dimana terjadinya kecurangan dikarenakan informasi yang diberikan berbeda dengan kenyataannya. Dengan dipilihnya tiga faktor tersebut juga untuk membuktikan kembali apakah ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi.

Terjadinya kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan disebabkan oleh adanya budaya etis organisasi. Menurut Marwansyah (2012:184) Budaya (Kebudayaan) adalah kombinasi yang kompleks dari asumsi-asumsi, perilaku, cerita, mitos, metafor, dan gagasan-gagasan lainnya yang terjalin satu sama lain untuk mencirikan suatu masyarakat tertentu. Budaya organisasi adalah sekumpulan pemahaman penting seperti norma-norma, nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota-anggota organisasi.

Menurut Najahnigrum (2013) budaya organisasi merupakan suatu sistem yang dianut oleh anggota-anggota dengan tujuan untuk membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain disekitarnya. Untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan diperlukan budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang kuat memicu karyawan untuk berfikir, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Sehingga, semakin kuat budaya etis organisasi, maka akan semakin sedikit kecurangan yang akan dilakukan oleh karyawan.

Selain budaya etis organisasi, hal yang mempengaruhi terjadinya kecendrungan kecurangan akuntansi adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan juga sebagai pedoman hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Zulkarnain 2013).

Penegakan hukum juga merupakan bagian dari penerapan hukum yang semestinya dapat berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipergunakan oleh rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum yang dilandasi oleh moral, nilai etik dan spiritual akan memberikan keteguhan komitmen kedalam tugas hukum. Penegakan hukum tersebut lebih dari sekedar menegakkan kebenaran formal, tetapi juga ditunjukan untuk mencari kebenaran materil yang diharapkan dapat mendekati kebenaran yang sifatnya hakiki. Penegakan hukum juga memiliki tanggungjawab yang juga bertumpu kepada sikap etis, moral, dan

spiritual. Semakin tinggi tingkat penegakan hukum maka akan mengurangi kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan (Ramadhana, 2015).

Asimetri Informasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana *agent* (pegawai) lebih memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak *principal* (masyarakat). Asimetri informasi tersebut muncul ketika agen lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan dengan prinsipal.

Menurut Mustikasari (2013) asimetri informasi juga terjadi antara *principal* dan *agent* dengan mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*. Hal ini memacu *agent* untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya sehingga semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi antara *agent* dan *principal* maka kecenderungan kecurangan akuntansi semakin tinggi.

Penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan (*fraud*) telah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian, diantaranya yaitu Wilopo (2006), menguji tentang Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, (2) kesesuaian

kompensasi berpengaruh negatif kecenderungan kecurangan akuntansi, (3) ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, (4) asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, (5) moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Najhningrum (2013) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada dinas DIY, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan peraturan, keefektifan pengendalian intern, keadilan distributif, keadilan prosedural, budaya etis manajemen, komitmen organisasi berpengaruh terhadap *fraud* dan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *fraud*. Penelitian Sulistyowati (2007) menyatakan hasil dari variabel budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* dan variabel kesesuaian kompensasi terhadap *fraud*. Sedangkan pada penelitian Ramawati dan soetikno (2012) menyatakan bahwa variable keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*, variabel asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Pramudita (2013) melakukan penelitian pada pemerintahan Salatiga, hasilnya menunjukkan gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis berpengaruh negatif terhadap *fraud* sedangkan komitmen organisasi dan penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Kasus kecurangan pengelolaan sektor keuangan di lingkungan pemerintah daerah juga terjadi di Sumatra Barat, mulai dari kasus korupsi,

dalam penggelapan anggaran daerah oleh sejumlah pihak, hingga adanya upaya untuk melakukan pemanfaatan dana pemerintahan daerah untuk memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh, informasi yang menunjukkan opini laporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang Panjang terlihat pada tabel 1.

Tabel 1: Hasil Evaluasi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2012 – 2016

Tahun	Opini Audit
2013	“WTP” Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf penjelas
2014	“WDP” Wajar Dengan Pengecualian
2015	“WDP” Wajar Dengan Pengecualian
2016	“WTP” Wajar Tanpa Pengecualian
2017	“WTP” Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: www.bpk.go.id

Pada tabel 1 terlihat bahwa opini audit yang diberikan auditor pemerintahan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, keadaan tersebut menunjukkan adanya kemajuan yang berarti didalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah Kota Padang Panjang. Kasus kecurangan yang baru-baru ini terjadi di Padang Panjang adalah kasus korupsi Anggaran Rumah Tangga (ART) tahun 2017 di Rumah Dinas Walikota Padang Panjang yang merugikan negara sebesar Rp160 juta.

Kasus selanjutnya yang terjadi di Padang Panjang adalah kasus korupsi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada tahun 2014. Korupsi yang dilakukan oleh Ketua KONI Padang Panjang dengan Kepala

Dewan Pengawas Keuangan Anggaran Daerah (DPPKAD) Padang Panjang. Akibatnya diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp849,4 juta.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengurangi atau menghindari adanya tindakan kecurangan terhadap laporan keuangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Budaya Etis Organisasi, Penegakan Hukum dan Asimetri Informasi terhadap kecendrungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*) (Studi Empiri pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang)”**

B. Rumusan Masalah

- a. Sejauhmana budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi (*fraud*)?
- b. Sejauhmana penegakan hukum berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi (*fraud*)?
- c. Sejauhmana asimetri informasi berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi (*fraud*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti mengenai :

1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi di pemerintahan daerah kota Padang panjang.

2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di pemerintahan daerah kota Padang Panjang.
3. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di pemerintahan daerah kota Padang Panjang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti/penulis; menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pengembangan ilmiah.
2. Bagi pemerintah daerah; semoga dapat menambah informasi untuk meminimalkan kecurangan akuntansi dengan pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Sebagai awal informasi penelitian lanjutan, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 pada Universitas Negeri Padang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. *Agency Teory*

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan suatu hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu orang atau lebih yang bertindak sebagai prinsipal (yaitu pemegang saham) menunjuk orang lain sebagai agen (yaitu manajer), prinsipal menggunakan jasa kepentingannya termasuk kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Manajer perusahaan di masa yang akan datang akan lebih mengetahui segala macam informasi dibandingkan pemilik (pemegang saham). Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan dalam memperoleh informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham sebagai pengguna informasi (*user*)

Dengan diberlakukannya undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sangat memberikan dampak terhadap perubahan pada sistem pemerintah yang pada umumnya menganut pola sentralisasi beralih pada pola desentralisasi, dimana daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki asal dapat dipertanggung jawabkan secara

nyata. Bila dihubungkan dengan *Agency Theory* maka dalam hal ini pemerintah daerah adalah *agent*, dan DPRD adalah *principale*.

Konsep *agency teory* menurut Anthony dan Govindarajan (2005) adalah hubungan kontak antara *principal* dan *agent*. Sedangkan Jensen dan Meckling (1976) dalam wilopo (2006) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbedaa dan masing-masing manginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pembrian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Pemberian kompensasi yang sesuai diharapkan akan mengurangi kecendrungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan uraian mengenai teeri *agency* tersebut disimpulkan bahwa teori *agency* dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kompensasi terhadap kecendrungan *fraud*.

2. Kecendrungan Kecurangan Akuntansi

a. Definisi Kecendrungan Kecurangan Akuntansi

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menurut Nur(1994) menjelaskan istilah cendrung merupakan condong, memihak, tidak tegak lurus, miring kesebelah, sehingga kecendrungan kecurangan akuntansi secara umum dapat diartikan suatu sikap condong, terdorong, memihak, kearah untuk melakukan tindakan, manipulasi, pemalsuan catatan akuntansi, penghapusan sengaja terhadap informasi yang ada dalam laporan, dan terdapat salah penerapan secara sengaja terhadap prinsip-prinsip akuntansi untuk memberikan manfaat/kerugian di luar maupun di dalam organisasi. Kecendrungan menunjukkan adanya indikasi untuk melakukan tindakan yang mengarah adanya kecurangan atau penipuan. Kecendrungan kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan dan fakta kritis (Soepardi, 2007)

Ikatan Akuntansi Indonesia dikutip oleh Wilopo (2006) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai berikut:

- 1) Salah saji yang menimbulkan kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau menghilangkan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.

- 2) Salah saji yang timbul dari perlakuan semestinya terhadap aktiva (serigkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kecurangan akuntansi tidak dapat dihindari.

Menurut Alison (2006) dalam artikel yang berjudul *Fraud Auditing* mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Menurut Arens (2015:396), kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam kaitannya dengan konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja.

Menurut Sawyer (2006:339) mengatakan bahwa Kecurangan adalah sebuah representasi yang salah atau menyembunyian fakta-fakta yang material untuk mempengaruhi seseorang agar mau ambil bagian dalam suatu hal yang berharga. *Institute of Internal Auditor*

(IIA) menyebutkan kecurangan adalah meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu.

Tindakan tersebut dapat dilakukan untuk keuntungan ataupun kerugian oleh orang-orang di luar maupun di dalam organisasi. Ada banyak istilah dari kecurangan, yaitu:

1) Kecurangan (*fraud*)

Kecurangan adalah sebuah representasi yang salah atau menyembunyikan fakta-fakta yang material untuk mempengaruhi seseorang agar mau mengambil bagian dalam suatu hal yang berharga. *Institute of Internal Auditors* (IIA) menyebutkan kecurangan meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan tersebut dapat dilakukan untuk keuntungan ataupun kerugian organisasi dan oleh orang-orang di luar maupun di dalam organisasi.

2) Kejahatan kerah putih (*white collar crime*)

Kejahatan kerah putih didefinisikan sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara nonfisik melalui menyembunyikan ataupun penipuan untuk mendapatkan uang atau harta benda, untuk menghindari pembayaran, atau untuk mendapatkan keuntungan bisnis atau pribadi.

3) Penggelapan (*Embezzlement*)

Penggelapan adalah konveksi secara tidak sah untuk kepentingan pribadi, harta benda yang secara sah berada di bawah pengawasan pelaku kejahatan.

b. Unsur-unsur Kecurangan

Menurut Sawyer (2006) Kecurangan dapat diakibatkan oleh kesalahan representasi yang disengaja adanya saran bahwa sesuatu hal adalah benar, padahal sebetulnya tidak, oleh seseorang yang tahu bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Pernyataan tidak benar yang dinyatakan sebagai fakta oleh seseorang yang memiliki dasar yang tidak memadai untuk memercayai bahwa hal tersebut adalah benar, penutupan fakta oleh seseorang yang diharuskan untuk mengungkapkannya. Kecurangan termasuk janji-janji palsu, janji yang dibuat dengan maksud untuk tidak akan dipenuhi.

Unsur-unsur kecurangan legal, ataupun penipuan seperti yang dikenal menurut hukum secara umum adalah:

- 1) Representasi yang salah atas fakta yang material, ataupun opini dalam beberapa kasus tertentu
- 2) Dibuat dengan pengetahuan akan kepalsuannya atau tanpa memiliki cukup pengetahuan subjek untuk dapat memberikan sebuah representasi.
- 3) Seseorang yang bertindak atas representasi tersebut.
- 4) Sehingga menimbulkan kerugian baginya.

Unsur-unsur dari apa yang disebut sebagai kejahatan kerah putih agak berbeda. Unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sbb:

- 1) Bermaksud untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan atau untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan kebijakan hukum maupun publik.
- 2) Menyamarkan tujuan melalui pemalsuan dan representasi yang tidak benar yang digunakan untuk mencapai maksud tersebut.
- 3) Ketergantungan pelaku kejahatan pada ketidaksadaran ataupun kesemburan dari kurban.
- 4) Tindakan secara sukarela yang dilakukan oleh korban untuk membantu pelaku kejahatan sebagai hasil dari praktik penipuan yang dilakukan.
- 5) Penutupan tindakan kriminal.

c. Bentuk-bentuk Kecurangan

Menurut Sukrisno (2004) dalam Softiyan (2017), fraud atau kecurangan bisa terjadi dalam berbagai bentuk diantaranya yaitu :

- 1) *Collusion*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut, biasanya merugikan perusahaan atau pihak ketiga.
- 2) *White collar crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan orang-orang berdasi (kalangan atas), misalnya mafia tanah.

- 3) *Embezzlement*, yaitu secara tidak sah harta benda untuk kepentingan pribadi.
- 4) *Intentional misrepresentation*, yaitu memberikan saran bahwa sesuatu itu benar, padahal itu salah, oleh seseorang yang mengetahui bahwa itu salah.
- 5) *Employee fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan seorang pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri.
- 6) *Management fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain, termasuk pemerintah. Misalnya manipulasi pajak, manipulasi kredit bank, dan lain-lain.

d. Faktor-faktor kecurangan

Menurut Tuanakotta (2015:321), terdapat 3 faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang di kenal dengan sebutan “*fraud triangle*” sebagai berikut:

1) Tekanan (*pressure*)

Ini sering didorong oleh kebutuhan yang (sangat) mendesak, termasuk kebutuhan untuk “sejajar” dengan tetangganya atau sekerja di perusahaan/kantor.

2) Peluang (*opportunity*)

Peluang ini berhubungan dengan budaya koporasi dan pengendalian intern yang tidak mencegah, mendeteksi, dan mengereksi keadaan.

3) Pemberan (*rationalization*)

Pembenaran adalah cara pelaku “menentramkan diri, misalnya “semua orang juga korupsi” atau “nanti saya kembalikan (jarahan saya)”

e. Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan

Di dalam laporan keuangan kecurangan dianggap sebagai suatu perlakuan yang disengaja, baik tindakan atau penghilangan yang menghasilkan laporan keuangan yang secara material menyesatkan. Berdasarkan *Assosiation of certified fraud examination* (ACFEE) dalam Mustikasari (2013) membagi *fraud* ke dalam tiga jenis, yaitu:

1) Kecurangan laporan keuangan

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor, kecurangan ini dapat bersifat finansial. Kecurangan dalam laporan keuangan terdiri dari tindakan manipulasi, pemalsuan catatan akuntansi, penghapusan secara sengaja terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan, dan terdapatnya salah penerapan secara sengaja terhadap prinsip-prinsip akuntansi.

2) Penyalahgunaan aset

Penyalahgunaan aset adalah bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset perusahaan atau organisasi untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.

3) Korupsi

Jenis kecurangan ini paling sulit dideteksi karena menyangkut dengan pihak lain atau kolusi. Termasuk jenis korupsi adalah penyuapan, gratifikasi (penerimaan tidak sah) contoh hadiah terkait jabatan dan wewenang.

Dengan meningkatnya kecurangan pelaporan keuangan, disatu sisi menguntungkan pelaku bisnis karena melebih-lebihkan (*over stated*) hasil usahanya dan kondisi keuangannya sehingga kelihatan baik dimata publik, tetapi pada sisi lain merugikan publik yang sangat menggantungkan keputusan ekonominya dari informasi laporan keuangan. Informasi laporan keuangan yang revelan dan bersih dari unsur fraud, akan melahirkan keputusan ekonomi yang tepat bagi pihak ketiga sebaliknya informasi yang mengandung kecurangan akan sangat menyesatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Jenis-jenis umum yang umum dari kecurangan dalam pelaporan keuangan meliputi:

- 1) Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber daya bagi penyajian laporan keuangan.
- 2) Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan.
- 3) Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
- 4) Penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian (penyalahgunaan/penggelapan) terhadap aktiva yang membuat entitas membayar barang/jasa yang tidak diterima.
- 5) Penyajian laporan keuangan yang salah akibat perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

f. Indikator Pengukuran Kecurangan Akuntansi

Dalam kecenderungan kecurangan akuntansi terdapat indikator yaitu:

1. Kecurangan Laporan keuangan
2. Penyalahgunaan Aset
3. Korupsi

3. Budaya Etis Organisasi

a. Pengertian Budaya Etis Organisasi

Budaya dapat tumbuh karena dikembangkan oleh individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi, dan diterima sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan dan pedoman bagi setiap anggota selama mereka berada dalam lingkungan organisasi, dan dapat dianggap sebagai ciri khas yang membedakan sebuah organisasi dengan yang lainnya diturunkan kepada setiap anggota baru. Nilai etika tersebut digunakan sebagai.

Menurut Robert G. Owens dalam Tika (2006:2) menjelaskan budaya adalah suatu sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang berinteraksi dengan orang dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku.

Menurut Sutrisno (2006:1) penggunaan istilah budaya organisasi dengan mengacu pada budaya yang berlaku dalam perusahaan, karena pada umumnya perusahaan itu dalam bentuk organisasi, yaitu kerja sama antara beberapa orang yang membentuk kelompok atau satuan kerja sama tersendiri.

Pentingnya konsep dari budaya organisasi adalah sebagai perspektif untuk memahami perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi (Ivancevich et al, 2006). Budaya organisasi menurut Schein (1992) dalam Zulkarnain (2013) adalah pola dasar yang

diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi.

Menurut Marwansyah (2012:185) budaya organisasi merupakan sebuah pola asumsi-asumsi dasar yang dianut bersama, yang dipelajari oleh kelompok pada saat menyelesaikan masalah-masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah berfungsi cukup baik sedemikian rupa sehingga bisa dipandang valid, kemudian diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat untuk membentuk perspsi, pikiran, dan perasaan yang terkait dengan masalah-masalah tersebut.

Sutrisno (2011:2) mendefinisikan budaya organisasi sebagai perangkat sistem nilai-nilai (*value*), keyakinan-keyakinan (*beliefs*), asumsi-asumsi (*assumptions*), atau norma-norma yang telah berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Budaya organisasi juga merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat mmenggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Secara tidak sadar tiap-tiap orang di dalam suatu organisasi mempelajari budaya yang berlaku dalam organisasinya. Apalagi bila ia sebagai arang yang baru supaya dapat diterima oleh lingkungan tempat kerja, ia berusaha mempelajari apa yang dilarang dan apa dan apa yang

diwajibkan, apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah, dan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam organisasi tempat bekerja itu. Jadi, budaya organisasi mensosialisasikan dan menginternalisasikan pada para anggota organisasi.

Menurut Najahningrum (2013) Budaya organisasi dapat disimpulkan sebagai suatu pola yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang tidak tertulis agar dapat dipatuhi oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi tersebut.

Luthans (2006), menyatakan karakteristik penting dalam budaya organisasi. Beberapa diantaranya adalah:

1. Aturan perilaku yang diamati, ketika anggota organisasi berinteraksi satu sama lain, mereka menggunakan bahasa, istilah, dan ritual umum yang berkaitan dengan rasa hormat dan cara berperilaku.
2. Norma. Adalah standar perilaku, mencakup pedoman mengenai seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan, yang dalam banyak perusahaan menjadi “jangan melakukan terlalu banyak jangan melakukan sedikit”.
3. Nilai dominan. Organisasi mendukung dan berharap peserta membagikan nilai-nilai utama. Contohnya adalah kualitas produk tinggi, sedikit absen, dan efisiensi tinggi.

4. **Filosofi.** Terdapat kebijakan yang membentuk kepercayaan organisasi mengenai bagaimana karyawan dan atau pelanggan diperlakukan.
5. **Aturan.** Terdapat pedoman ketat berkaitan dengan pencapaian perusahaan. Pendatang baru harus mempelajari teknik dan prosedur yang ada agar diterima sebagai anggota kelompok yang berkembang.
6. **Iklim Organisasi.** Merupakan keseluruhan “perasaan” yang disampaikan dengan pengaturan baru yang bersifat fisik, cara peserta berinteraksi, dan cara anggota organisasi berhubungan dengan pelanggan dan individu dari luar.

Robert Kreitner dan Angelo Kinichi (200) dalam Najahningrum (2013) menjelaskan tindakan-tindakan berikut ini untuk mengembangkan iklim etika dalam organisasi:

a. Bertingkah laku etis

Manajer hendaknya berlaku etis, karena manajer model peran yang jelas.

b. Penyaringan karyawan yang potensial

Untuk mengembangkan perilaku etis harus dilakukan sejak awal yaitu sejak seleksi karyawan dilakukan. Penyaringan yang lebih teliti di bidang ini dapat menyaring mereka untuk tidak berbuat kesalahan di kemudian hari. Mengembangkan kode etik yang

lebih berarti. Kode etik dapat menghasilkan dampak yang positif bila mereka memenuhi empat kriteria:

- 1) Kode etik harus mencakup atau berlaku kepada setiap karyawan
- 2) Kode etik sungguh-sungguh didukung oleh top manajemen
- 3) Kode etik harus mengacu kepada praktik spesifik
- 4) Mereka (karyawan) hendaknya didorong dengan penghargaan atas prestasinya dan hukuman yang berat bagi ketidakpatuhan

c. Menyediakan pelatihan etika

Para karyawan dapat dilatih untuk mengidentifikasikan dan berhadapan dengan isu etis selama masa orientasi dan melalui sesi seminar dan pelatihan menggunakan video.

d. Meningkatkan perilaku etis

Perilaku etis harus didukung dibiasakan, diulangi kembali sedangkan perilaku yang tidak etis harus diberikan hukuman sementara perilaku etis hendaknya dihargai.

e. Membentuk posisi, unit, dan mekanisme struktural lain yang menggunakan etika. Etika harus menjadi kegiatan sehari-hari, bukan kegiatan yang sekali dilakukan kemudian disimpan dan dilupakan.

Menurut Facruniah (2015) budaya etis merupakan faktor yang paling kritis dalam organisasi. Efektivitas dalam organisasi

dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang kuat, yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi yang berbudaya kuat akan memiliki ciri khas tertentu sehingga dapat memberikan daya tarik bagi individu untuk bergabung.

Budaya Etis Organisasi adalah sistem nilai, norma dan kepercayaan yang bersama-sama dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi agar terciptanya perilaku baik dan beretika, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan organisasi.

Budaya Etis Organisasi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perilaku etis. Secara umum, individu dilatarbelakangi oleh budaya yang mempengaruhi perilakunya. Budaya menuntut individu untuk berperilaku dan memberi petunjuk pada mereka mengenai apa saja yang harus diikuti dan dipelajari.

Pristiyati (2012), menjelaskan bahwa budaya etis organisasi adalah persepsi pegawai pemerintah mengenai pola perilaku atau kebiasaan yang baik, buruk, dapat diterima atau tidak oleh lingkungan. Pandangan luas tentang persepsi pegawai di instansi pemerintah yang menaruh perhatian pentingnya etika di organisasi dan akan memberikan penghargaan ataupun sanksi atas tindakan yang tidak bermoral.

b. Indikator Budaya Etis Organisasi

Dalam budaya etis organisasi terdapat indikator yang mengacu menurut Pristiyantri (2012), yaitu:

- 1) Model peran yang visible;
- 2) Komunikasi harapan-harapan etis;
- 3) Pelatihan etis;
- 4) Hukuman bagi tindakan etis;
- 5) Mekanisme perlindungan etika.

4. Penegakan hukum

a. Pengertian penegakan Hukum

Hukum dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara umum, fungsi hukum adalah mengatur tata kehidupan bermasyarakat agar dapat terciptanya suatu kerukunan, ketertiban, keadilan dan perdamaian, mengatur dan mengkoordinasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat agar tidak terjadi terbenturnya kepentingan yang berbeda dan melindungi segala kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya itu, misal kepentingan seseorang terhadap jiwanya, kehormatannya, harta bendanya dan sebagainya.

Fungsi hukum menurut Soerjono Soekanto dalam Ali, (2009) mengatakan bahwa di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Sebagai tata kaedah fungsi hukum adalah menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum seharusnya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai pengendalian sosial. Hukum menjadi arah bagi masyarakat memperoleh kesejahteraan karena hak-hak masyarakat dikelola oleh pemerintah dimana pemerintah juga memiliki tujuan agar masyarakat memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Penegakan hukum adalah mereka (orang-orang yang secara langsung dan tidak langsung berkecimbung di dalam upaya menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Dalam arti luas Penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit proses penegakan hukum merupakan upaya aparat

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dalam sikap, sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Sudikno (2005) mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.

Faisal (2013) mengatakan bahwa kecenderungan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai tindak pidana atau korupsi. Penegakan hukum yang berlaku merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada di suatu negara. Kebanyakan

masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhi. Banyak hukum yang menjadi dasar mengenai pengelolaan keuangan daerah dan undang-undang maupun peraturan pemerintahan yang melarang melakukan *fraud* bagi pegawai dan pejabat pemerintahan, dan banyak juga sanksi yang dikenakan kepada pelaku fraud diantaranya hukuman penjara dan denda uang, namun masih saja banyak kasus demi kasus yang terjadi sehingga dapat dilihat bahwa seperti tidak memiliki kekuatan bagi pelaku fraud.

Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi fraud di sektor pemerintahan. Penegakan hukum yang kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran berupa kecurangan tersebut. Dengan demikian apabila semakin tegak penegakan hukum dalam suatu organisasi atau instansi maka kecenderungan kecurangan yang mungkin terjadi akan semakin rendah dan begitu sebaliknya (Kurrohman 2017)

b. Indikator Penegakan Hukum

Instrumen yang digunakan untuk mengukur penegakan terdiri dari empat item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian Zulkarnain (2013), yaitu:

- 1) Ketaatan terhadap hukum;
- 2) Proses penegakan hukum;
- 3) Peraturan organisasi;
- 4) Disiplin kerja;

5) Tanggung jawab.

5. Asimetri Informasi

a. Pengertian Asimetri Informasi

Wilopo (2006), menyatakan asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi ketidak selarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Najahningrum (2013) asimetri informasi merupakan kondisi dimana terjadinya ketidakseimbangan yang dimiliki oleh agen dan prinsipal yang disebabkan karena distribusi informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak.

Anthony dan Govindrajan (2001), menyatakan bahwa kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (*agency theory*), yaitu principal (pemilik/ataa) memberikan wewenang kepada agen (manajer/bawahan) untuk mengatur perusahaan yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang akan menyebabkan manajer sebagai pengelola perusahaan akan lebih mengetahui prospek dan informasi perusahaan sehingga menimbulkan ketidak seimbangan informasi antara manajer dengan pemilik yang disebut dengan asimetri informasi.

b. Bentuk Asimetri Informasi

Ada dua bentuk asimetri informasi, yaitu:

- 1) Asimetri informasi vertikal, yaitu informasi yang mengalir dari tingkat yang lebih rendah (bawahan) ke tingkat yang lebih

tinggi (atasan). Setiap bawahan dapat mempunyai alasan yang baik dengan meminta atau memberikan informasi kepada atasan.

- 2) Asimetri informasi horizontal , yaitu informasi yang mengalir dari orang-orang dan jabatan yang sama tingkat otoritaenya atau informaei yang bergerak diantara orang-orang dan jabatan-jabatan yang tidak menjadi ataeen ataupun bawahan antara satu dengan yang lainnya dan mereka menempati bidang fungsionalnya yang berbeda dalam organisasi namun dalam level yang sama.

c. Tipe Asimetri Informasi

Menurut Kusumastuti (2012) terdapat dua tipe asimetri informasi yaitu:

- 1) *Ad verse Selection. Adverse Selection* adalah sejenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transakei ueaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* dapat terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insider*) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek kedepan suatu perusahaan dari pada para investor.
- 2) *Moral Hazard. Moral Hazard* adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam

penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak yang lainnya tidak. *Moral Hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

d. Indikator Asimetri Informasi

Asimetri informasi dalam penelitian ini mempunyai beberapa indikator yang mengacu kepada indikator penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006), yaitu:

- 1) Situasi dimana manajemen memiliki informasi yang lebih baik atas aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dibandingkan pihak luar perusahaan.
- 2) Situasi dimana manajemen lebih mengenal hubungan input-output dalam bagian yang menjadi tanggung jawabnya pihak luar perusahaan.
- 3) Situasi dimana manajemen lebih mengetahui potensi kinerja yang menjadi tanggung jawab dibanding pihak luar perusahaan.
- 4) Situasi dimana manajemen lebih mengenal teknis pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan.
- 5) Situasi dimana manajemen lebih mengetahui pengaruh eksternal dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan.

- 6) Situasi dimana manajemen lebih mengetahui apa yang dapat dicapai dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan.

B. Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas penelitian ini

1. Wilopo (2006), menguji tentang Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi, (2) kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif kecendrungan kecurangan akuntansi, (3) ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi, (4) asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi, (5) moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi.
2. Najahningrum (2013) menguji tentang, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecendrungan Kecurangan (*Fraud*) (Persepsi Pegawai Dinas provinsi DIY). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) penegakan peraturan (PP) berpengaruh negatif terhadap kecendrungan kecurangan (*fraud*), (2) keefektifan pengendalian intern (KPI) berpengaruh negatif terhadap kecendrungan kecurangan (*fraud*), (3) asimetri informasi (AI) berpengaruh positif terhadap kecendrungan

kecurangan (*fraud*), (4) keadilan distributif (KD) berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), (5) keadilan prosdural (KP) berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecuranngan (*fraud*), (6) komitmen organisasi (KO) berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), dan (7) budaya etis organisasi (BEO) perpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

3. Zulkarnain (2013) menguji tentang, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas se-Kota Surakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) keefektifan sistem pengendalian intern (KSPI) berpengaruh negatif terhadap *Fraud* di sektor pemerintahan, (2) kesesuaian kompensasi (KK) berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintah, (3) kultur organisasi (KO) berpengaruh negatif terhadap *fraud* d sektor pemerintah, (4) perilaku tidak etis (PTE) berpengaruh positif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, (5) gaya kepemimpinan (GK) berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, (6) sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, dan (7) penegakan hukum (PH) berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.
4. Sari (2013) menguji tentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintahan Kota Bandar Lampung (Persepsi Pegawai Pemerintah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*, (2)

keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud, (3) penegakan hukum berpengaruh positif terhadap fraud, (4) perilaku tidak etis berpengaruh negatif terhadap fraud, (5) asimetri informasi berpengaruh terhadap fraud, dan (6) kultur organisasi berpengaruh positif terhadap fraud.

5. Mustikasari (2013) menguji tentang Persepsi Pegawai Dinas Se-Kabupaten Batng tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud) hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis manajemen, dan komitmen organisasi terhadap kecurangan (fraud) di sektor pemerintah, (2) terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap kecurangan (fraud) di sektor pemerintah, dan (3) tidak terdapat pengaruh antara keadilan prosedural dengan kecurangan (fraud di sektor pemerintah).

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Budaya Organisasi terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi

Budaya merupakan nilai-nilai yang dianut dalam suatu kelompok organisasi. Iklim budaya yang baik akan menciptakan perilaku yang baik pula kepada setiap orang yang berada dalam lingkungan organisasi tersebut. Dalam perusahaan kecurangan adalah suatu hal yang wajar atau biasa terjadi. Setiap orang dalam perusahaan

tersebut akan cenderung melakukan kecurangan karena pegawai tersebut merasionalkan tindakan tersebut sebagai tindakan yang biasa atau wajar terjadi. Dalam organisasi pemerintah yang kebanyakan pegawainya melakukan kecurangan dan hal tersebut di anggap wajar, pegawai akan melakukan kecurangan tersebut dikarenakan pembenaran bahwa itu adalah suatu hal yang wajar. Demikian sebaliknya, jika dalam suatu instansi ditanamkan nilai-nilai bahwa suatu kecurangan merupakan tindakan yang tidak baik dan merugikan banyak pihak, maka pegawai cenderung tidak akan melakukan kecurangan tersebut.

Pristiyanti (2012) menunjukkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecurangan di sektor pemerintah. Dengan demikian, semakin baik iklim budaya etis yang dapat diciptakan dalam lingkungan perusahaan akan meminimalisir kecendrungan kecurangan (fraud) yang dilakukan pegawai.

Budaya etis organisasi merupakan suatu pola tingkah laku, kepercayaan yang telah menjadi suatu panutan bagi semua anggota organisasi, tingkah laku juga merupakan suatu yang dapat diterima oleh moral dan benar secara hukum, di dalam budaya organisasi yang etis terdapat adanya suatu komitmen dan lingkungan yang etis pula.

2. Hubungan Penegakan Hukum terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi

Kecurangan secara umum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dilakukan oleh orang-orang dari dalam organisasi, dengan maksud

dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok secara langsung merugikan pihak lain. Atau lebih di perjelas sebagai tindakan korupsi. Kecurangan dapat disebabkan oleh adanya ketidaksadaran akan pentingnya menaati hukum/peraturan maupun kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum/peraturan. Masyarakat mengerti tentang hukum tetapi tidak mematuhi. Kesadaran untuk mematuhi hukum akan timbul apabila penegakan hukum dapat berjalan semestinya. Dengan adanya penegakan hukum/peraturan yang baik diharapkan dapat mengurangi kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan.

Rachmatan dan Ikhan (2014) Penegakan peraturan/hukum adalah suatu proses atau upaya ditegakkannya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan. Semua kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka, harus ada penegakan peraturan yang tegas dalam lingkungan organisasi tersebut.

Penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan atau yang disebut perbuatan melawan hukum (Asshiddiqie, 2008). Kecurangan merupakan perbuatan melawan hukum karena tindakan tersebut melanggar aturan, baik dari segi etika maupun hukum.

Menurut Chandra (2015) penegakan peraturan dimaksudkan sebagai pedoman bagi seseorang dalam melakukan tindakan ataupun sebagai alat pengendalian dalam bertindak. Tingkat ketaatan seorang

pegawai menjadi dasar untuk dirinya dalam usaha berkontribusi dalam instansi. Semakin tinggi tingkat ketaatan terhadap penegakan hukum maka akan semakin kecil peluang pegawai tersebut berbuat atau melakukan tindakan yang merugikan instansi, sebaliknya jika tingkat ketaatan terhadap peraturan/hukum rendah maka pegawai tersebut cenderung mengesampingkan peraturan yang berlaku dan cenderung melakukan tindakan kecurangan.

3. Hubungan Asimetri Informasi terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi

Keadaan dimana salah satu pihak mempunyai pengetahuan lebih dari pada yang lainnya terhadap sesuatu hal disebut asimetri informasi Utomo (2006) dalam Friskila (2010). Apabila terjadi asimetri informasi maka manajemen akan menyajikan laporan keuangan yang bias dan bermanfaat bagi mereka seperti untuk mempertahankan jabatan, memperoleh kompensasi yang tinggi atau hanya sekedar untuk mendapatkan apresiasi dari atasan atas kinerjanya.

Asimetri informasi merupakan kondisi dimana terjadi ketidak seimbangan informasi yang diperoleh pihak principal dan agent. Suatu kondisi dimana pihak dalam atau pengelola perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar atau pihak pemakai informasi selain pengelola. Dalam lingkup entitas perusahaan, yang menjadi pengguna informasi merupakan masyarakat. Karena pihak

Dinas Pemerintah merupakan pihak pengelola dana APBN yang sebagian besar berasal dari masyarakat. Kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi pegawai untuk menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebenarnya. Dengan tujuan semata-mata karena ingin mendapatkan penilaian yang baik atas kinerjanya.

Asimetri informasi timbul karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen, dan agen memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan (Nasution dan Doddy, 2007 dalam Rahmawati, 2012). Dalam penelitian Wilopo (2006) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecendrungan kecurangan. Semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi antara pihak pengelola dan pihak pengguna laoran keuangan, kecendrungan terjadinya tindak kecurangan (fraud) akan semakin tinggi.

Asimetri informasi memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan kecurangan, karena informasi yang disediakan oleh pihak penyedia informasi tidak selaras dengan informasi yang dibutuhkan, dan manajemen memanfaatkan keadaan tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan cara melakukan penyajian laporan keuangan yang bias dan nantiknya akan memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri, hal ini akan semakin besar peluang keterjadiannya apabila manajemen organisasi atau lembaga tidak memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. Untuk meminimalisir terjadinya kecendrungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen,

maka pengendalian intern tersebut juga harus ditingkatkan, apabila pengendalian sudah baik maka kesempatan terjadinya asimetri informasi tersebut akan dapat diminimalisir yang akan berakibat penghentian tindakan kecenderungan kecurangan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan hubungan atau kaitan antara variabel independen dengan variabel dependen, dalam penelitian ini memperlihatkan hubungan antara pengaruh budaya etis organisasi, penegakan hukum dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dalam maupun luar organisasi guna memperoleh keuntungan baik untuk pribadi maupun kelompok. Kecurangan laporan keuangan juga merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja.

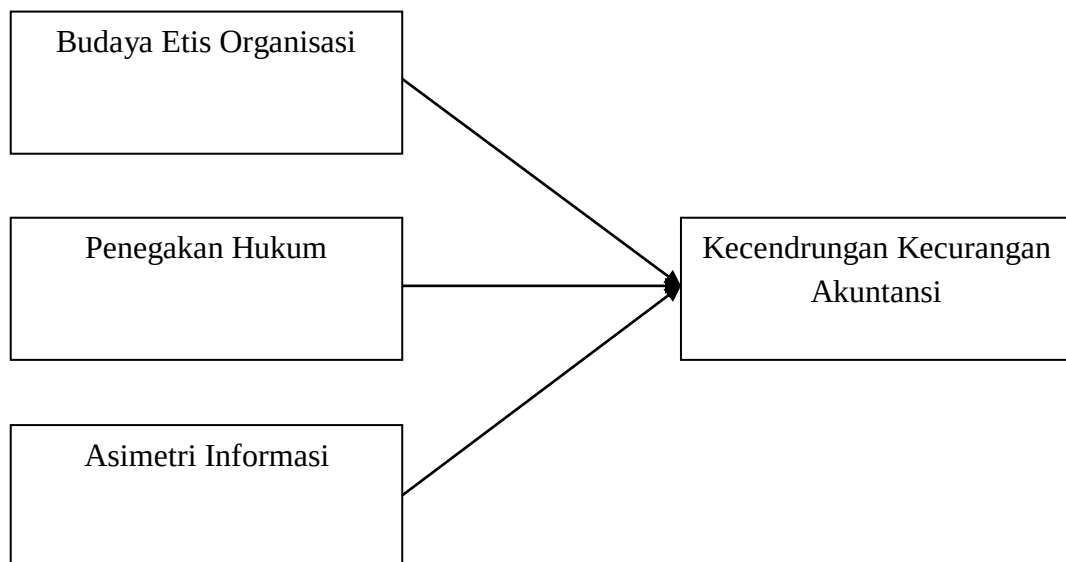
Budaya etis organisasi merupakan suatu nilai-nilai etika atau tingkah laku, kepercayaan yang menjadi panutan bagi semua anggota organisasi yang dapat diterima oleh moral dan benar secara hukum. Semakin rendah budaya etis organisasi maka akan membuat pegawai beranggapan bahwa kecurangan adalah suatu hal yang wajar. Sebaliknya apabila dalam instansi tersebut ditanamkan nilai-nilai dengan menjelaskan bahwa kecurangan suatu yang tidak baik dan dapat merugikan semua pihak, maka pegawai cenderung tidak akan melakukan kecurangan.

Penegakan hukum merupakan norma-norma hukum yang menjadi pedoman perilaku dan sebagai upaya penegakan hukum untuk menjamin dan

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kecurangan terjadi karena kurangnya ketegasan dan ketidaksadaran dalam menaati hukum/peraturan.

Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan dalam memperoleh informasi, antara pihak yang menyediakan informasi dan pihak yang membutuhkan informasi. Dengan demikian terdapat peluang bagi pegawai untuk menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

H1 : Budaya Etis Organisasi berpengaruh negatif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi

H2 : Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H3 : Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Budaya Etis Organisasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di pemerintah daerah Kota Padang Panjang.
2. Penegakan Hukum berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di pemerintah daerah Kota Padang Panjang.
3. Asimetri Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di pemerintah daerah Kota Padang Panjang.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain

1. Lamanya menunggu surat balasan untuk melakukan izin penelitian di Pemda Padang Panjang.

2. Kurangnya waktu penelitian, lokasi SKPD yang berbeda-beda dan kesibukan setiap dinas mengakibatkan pembagian dan pengumpulan kuisioner tidak sesuai target.
3. Susah mencari teori pendukung untuk memperkuat pembahasan.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut di atas, maka beberapa saran yang diusulkan dalam penelitian selanjutnya⁸⁷ adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa budaya etis organisasi, penegakan hukum dan asimetri informasi para pegawai sudah cukup baik, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada mulculnya kecurangan akuntansi di pemerintah. Bagi instansi diharapkan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas untuk setiap pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya kecurangan dan merugikan organisasi.
2. Penelitian ini masih terbatas pada budaya etis organisasi, penegakan hukum dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh lebih kuat terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja. 1992. Pemeriksaan Kecurangan (Fraud Auditing), Rineka cipta: Jakarta
Transparancy International, 2016. Peringkat Korupsi Negara di Dunia.
- Anthony, N Robert dan Govindarajan, Vijay. 2005. Management Control System buku 2. Salemba empat: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Arens, Alvin A. 2015. Auditing & Jasa Assurance. Edisi Kelimabelas. Jilid 1 Jakarta: Erlangga
- Chandra, Devia Prapnalina. 2015. Determinan Terjadinya Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*) Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Grobogan. Skripsi. Unoversitas Negeri Semarang.
- Faisal, Muhammad. 2013. Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus. Accounting Analysis Journal. Vol. 5 No. 2.
- Friskila. Monigka. 2010. Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Manajemen dan Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN di Kota Padang). FE UNP: Padang
- IAI. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) per Januari 2001. Jakarta: Salemba empat
- Jansen, Michael C & Meckling, William H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal Of Financial Economics
- Kumalasari, Nova Riska. 2011. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Kota Bandung. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Kusumastuti, Nur Ratri. 2012. “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening”. Skripsi: Semarang: UNDIP
- Luthans. Fred. 2006. Perilaku Organisasi. Edisi Sepuluh. Yogyakarta :Penerbit Andi
- Mustikasari. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. Universitas Negeri Semarang: Accounting Analysis Journal. ISSN 2252-6765

- Najahningrum, Anik Fatun. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 2 (3).
- Pramudita, Aditya. 2013. Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 1 (2).
- Pristiyanti, Ika Ruly. 2012. "Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan." Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES.
- Puspasari, Novita & Suwardi, Eko. (2012). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintahan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi* 15.
- Puspitadewi dkk. 2012. "Hubungan Keadilan Organisasional dan Kecurangan Pegawai dengan Moderating Kualitas Pengendalian Internal." *The Indonesian Accounting Review* Volume 2 no. 2 pages 159-172.
- Rahmawati, Ardiana Peri. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ramdhana, Senna Afriaska. (2015). Persepsi Pegawai Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (*Fraud*). Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sari, Deviana. 2016. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan Kota Bandar Lampung (Persepsi Pegawai Pemerintah)." Tesis. Universitas Lampung.
- Sawyer, Lawrence.B. 2006. *Internal Auditing*. Salemba Empat: Jakarta.
- Softian, Pria Agung. 2017 "Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Motivasi dan Budaya Etis organisasi terhadap Kecendrungan Laporan Keuangan Daerah." Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi UNP.
- Sulistiyowati. 2007. Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Korupsi. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Sudarma, Putu Mudyasani & Putra, I Wayan. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance pada Biaya Keagenan. Universitas Udayana. ISSN 2302-8556
- Sutrisno, Edy. 2011. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana
- Thoyibatun, Siti. (2009). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis Dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.

Tika, Moh Pabubi. 2006. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Bumi Aksara: Jakarta

Transparency International, 2017. Peringkat Korupsi Negara di Dunia.

Tuanakotta, Thoedorus. 2015. “Audit Kontemporer” Jakarta : Selemba Empat

Undang – undang Dasar 1945

www.bpk.go.id

Wilopo.(2006). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X. Padang

Zulkarnain, Rifqi Mirza.2013.”Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta”. Accounting Analysys Journal AAJ1(3)(2013)

<https://katadata.co.id/berita/2017/10/03/bpk-temukan-permasalahan-senilai-rp-2739-triliun-di-semester-i2017>

<https://sumbar.antaranews.com/berita/95160/terdakwa-korupsi-koni-padang-panjang-divonis.html>